

Pandemi: Tantangan Kebijakan dan Akuntabilitas Publik  
"Ketegangan Pusat-Daerah"

MISBAH HASAN  
Sekjen FITRA  
Hp. 0822 1171 3249

# Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19

---

- 1 Instruksi Presiden No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- 2 Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19/dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- 3 Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA. 2020
- 4 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19
- 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA. 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19
- 6 Permendagri No. 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 7 Keputusan Bersama Kemendagri No. 119/2813/SJ & Kemenkeu No. 177/KMK.07/2020 ttg Percepatan Penyesuaian APBD TA. 2020 dlm Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
- 8 SE Menteri Desa, PDTT No. 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- 9 SE Mendagri No. 440/2703/SJ/2020 tentang Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa
- 10 SE KIP No. 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Masa Darurat Kesehatan
- 11 SE KPK No. 8/2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- 12 PMK No. 38/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

# Anggaran Penanganan Covid Daerah Dipengaruhi oleh Postur APBN-P 2020

Berdasar Perpres 54/2020

(Dalam Ribu Rupiah)

URAIAN		APBN 2020	APBN-P 2020	Selisih	%
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>2.233.196.701.660</b>	<b>1.760.883.901.130</b>	<b>-472.312.800.530</b>	<b>-27%</b>
I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.232.697.961.660	1.760.385.161.130	-472.312.800.530	-27%
	1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.865.702.816.382	1.462.629.688.832	-403.073.127.550	-28%
	2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	366.995.145.278	297.755.472.298	-69.239.672.980	-23%
II.	PENERIMAAN HIBAH	498.740.000	498.740.000	0	0%
<b>B.</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>2.540.422.500.559</b>	<b>2.613.819.877.869</b>	<b>73.397.377.310</b>	<b>3%</b>
I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683.477.179.135	1.851.101.008.789	167.623.829.654	9%
	<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>856.945.321.424</b>	<b>762.718.869.080</b>	<b>-94.226.452.344</b>	<b>-12%</b>
<b>C.</b>	<b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>-12.012.458.899</b>	<b>-517.779.676.739</b>	<b>-505.767.217.840</b>	<b>98%</b>
<b>D.</b>	<b>SURPUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>-307.225.798.899</b>	<b>-852.935.976.739</b>	<b>-545.710.177.840</b>	<b>64%</b>
	% Defisit Anggaran terhadap PDB	-1,76	-5,07	-3	65%
<b>E.</b>	<b>PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>307.225.798.899</b>	<b>852.935.976.739</b>	<b>545.710.177.840</b>	<b>64%</b>
I.	<b>PEMBIAYAAN UTANG</b>	<b>351.853.256.250</b>	<b>1.006.400.481.800</b>	<b>654.547.225.550</b>	<b>186%</b>
II.	PEMBIAYAAN INVESTASI	-74.229.874.207	-229.324.135.317	-155.094.261.110	68%
III.	PEMBERIAN PINJAMAN	5.192.999.856	5.810.213.256	617.213.400	11%
IV.	KEWAJIBAN PENJAMINAN	-590.583.000	-590.583.000	0	0%
V.	PEMBIAYAAN LAINNYA	25.000.000.000	70.640.000.000	45.640.000.000	65%

# Refocussing & Realokasi APBN-P 2020



- Kebutuhan untuk realokasi dan refocussing penanganan covid-19 sebesar Rp 405,1 Triliun (15% dari Total Belanja Negara)
- Hasil realokasi anggaran K/L hanya 3% -- kurang 331,8 Triliun (12% dari Total Belanja Negara)
- Anggaran penanganan covid-19 digunakan untuk Kesehatan Rp75 T (3% dari APBN), Perlindungan Sosial Rp110 T (4% dari APBN), Pajak dan KUR Rp 70,1 T (3% dari APBN) dan Pemulihan Ekonomi Rp150 T (6% dari APBN)

## STIMULUS PENANGANAN COVID-19

# Rp405 T



### JARING PENGAMAN SOSIAL

## Rp110 T



### DANA KESEHATAN

## Rp75 T



PKH disalurkan kepada 10 juta KPM, yang bantuannya dinaikkan 25% dalam setahun.



Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM, dengan manfaat sebesar Rp200.000,- selama 9 bulan atau naik 33%



Kartu pra kerja dinaikkan dari Rp10 T menjadi Rp20T, untuk mengcover 5,6 juta pekerja informal, pelaku UMKM.



Pembebasan biaya listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

Penugasan khusus Presiden untuk (1) Bansos di Jabodetabek sebagai antisipasi mudik, (2) BLT untuk seluruh Indonesia kecuali Jabodetabek

- **Bantuan Khusus DKI Jakarta** berupa 200 ribu paket sembako
- **Santunan kematian** bagi ahli waris korban COVID-19 yang meninggal dunia
- **Paket sembako** untuk 460 LKS di Jabodetabek
- **Bantuan penguatan usaha** *sustainment grant* bagi 10.000 KPM.



### INSENTIF PERPAJAKAN & STIMULUS KREDIT USAHA RAKYAT

## Rp70,1 T

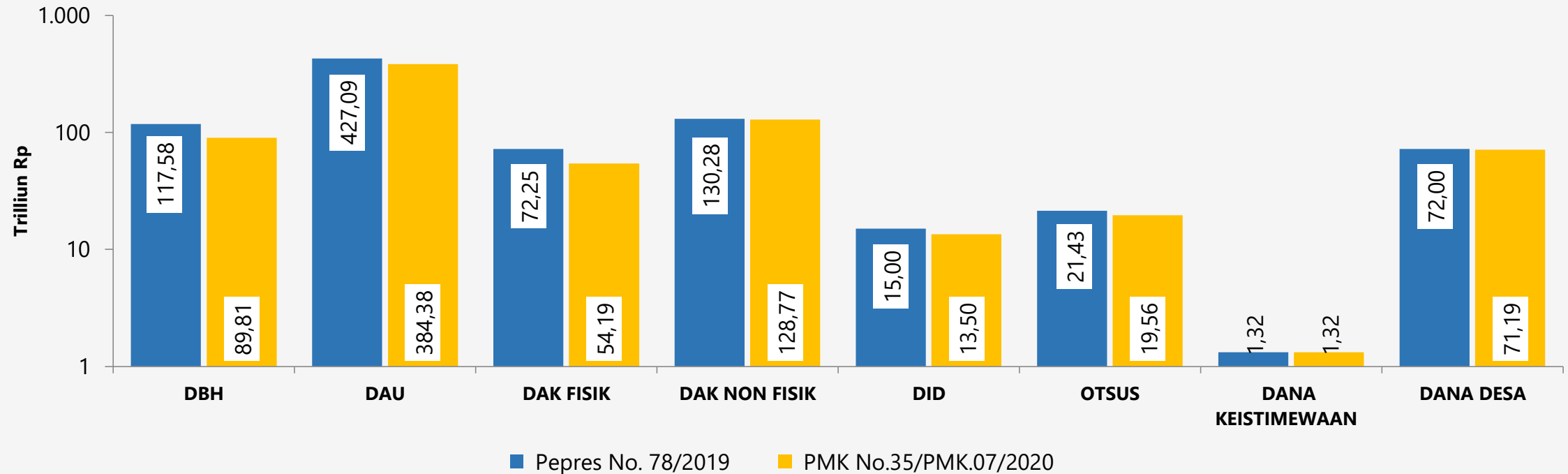


### PEMBIAYAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

## Rp150 T

Transfer ke Daerah dan DD berkurang hingga -Rp94,2 Triliun (-12% dari Total TKDD 2020) ...

### Total Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

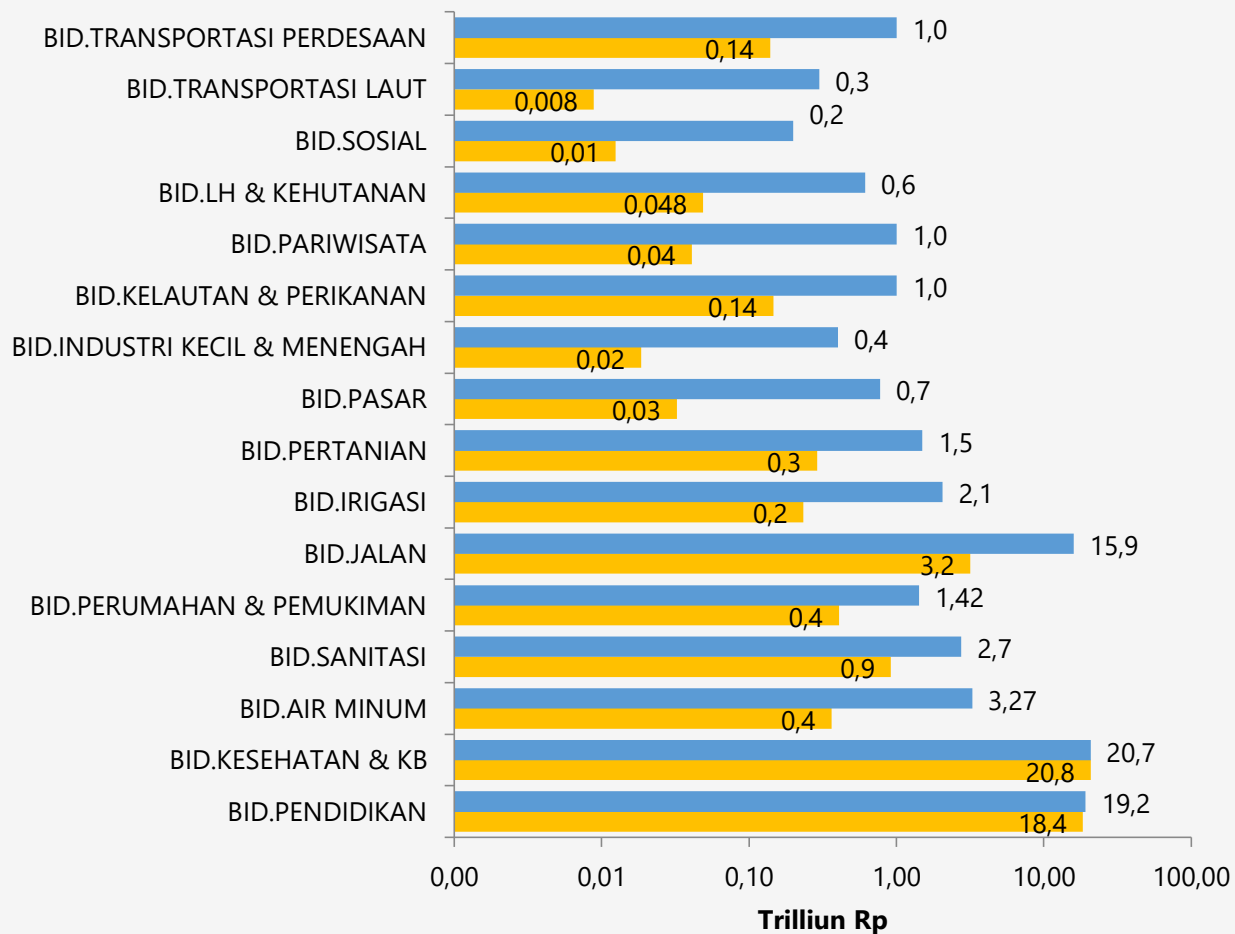


- Secara nominal, penurunan terbesar pada transfer DAU hingga -Rp42,71 Triliun, DBH -Rp27,76 Triliun, dan DAK Fisik -Rp18,06 Triliun;
- Namun secara persentase, penurunan terbesar pada DAK Fisik (-33%), DBH (-31%), dan DAU (-11%).

# DAK Fisik Bidang Kesehatan Rp20,8 Triliun & DAK Non-Fisik BOK/BOK Tambahan Rp13,4 Triliun ...

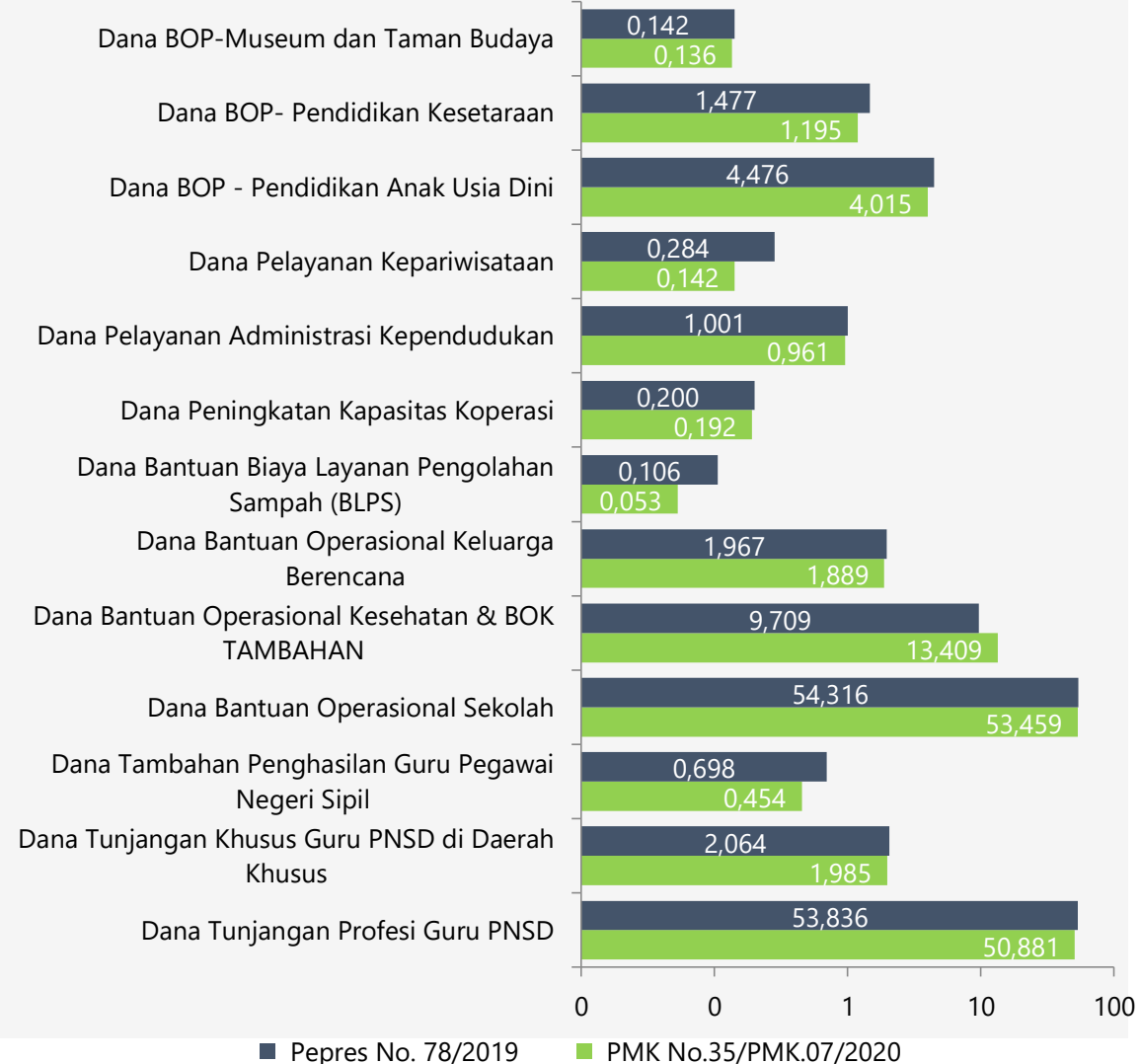
## DAK FISIK

(DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi)



■ Pepras No. 78/2019 ■ PMK No.35/PMK.07/2020

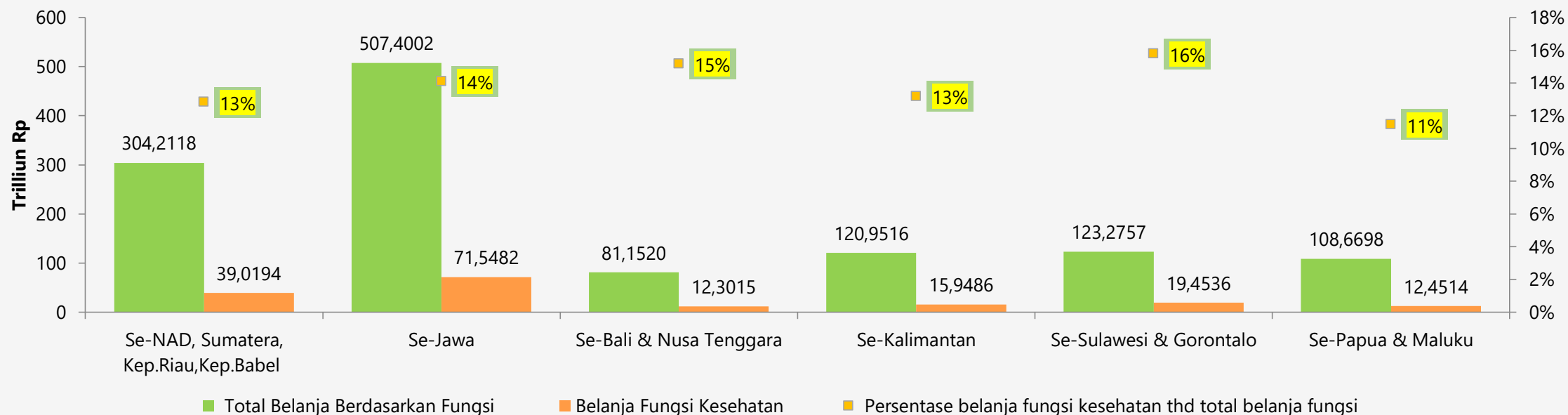
## Alokasi DAK Non Fisik



■ Pepras No. 78/2019 ■ PMK No.35/PMK.07/2020

# Potret Anggaran Fungsi Kesehatan Per Wilayah ...

## Belanja Fungsi Kesehatan Pemerintah Daerah (Prov, Kab, Kota) se-Indonesia Tahun 2019

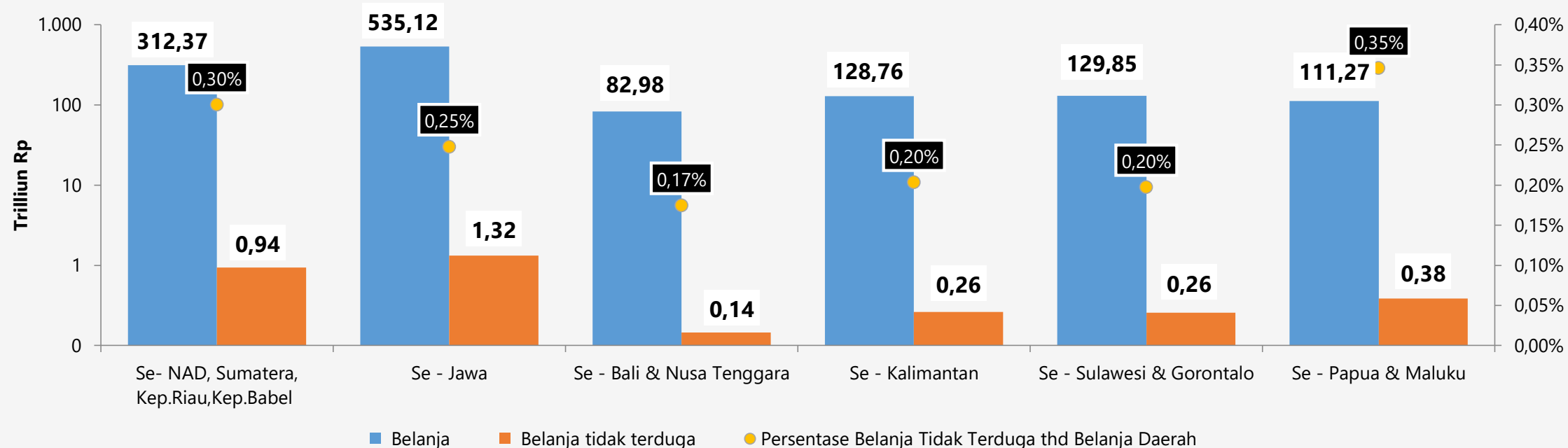


- Seluruh wilayah di Indonesia telah memenuhi mandatori UU Kesehatan terkait besaran alokasi anggaran untuk Fungsi Kesehatan di atas 10 persen;
- Selain untuk penanganan covid-19, anggaran Fungsi Kesehatan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan lain, seperti stunting, AKI/AKB, germas, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai prioritas daerah masing-masing.



# Potret Belanja Tidak Terduga 2020 ..

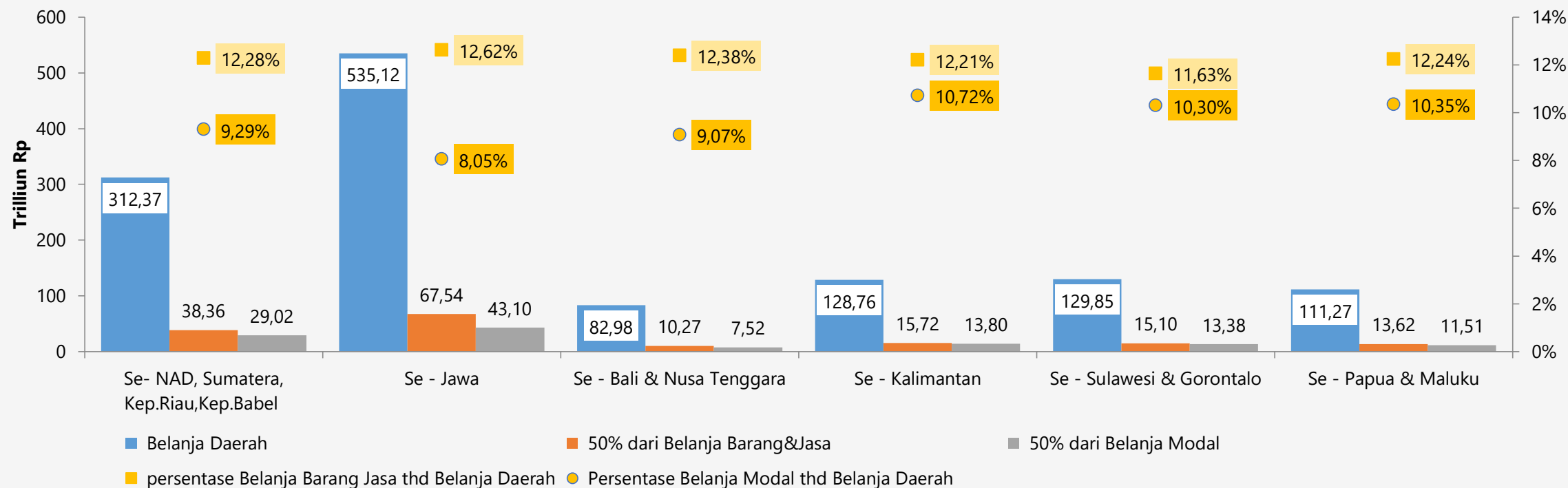
## Nominal dan Persentase Belanja Tidak Terduga Prov/Kab/Kota Seluruh Indonesia



- Total Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi/Kab/Kota se Indonesia sebesar Rp3,3 Triliun;
- Persentase BTT rata-rata hanya 0,2% dari total Belanja Daerah provinsi/Kab/kota seluruh Indonesia;
- Meski Indonesia termasuk wilayah rawan bencana (bencana alam & bencana non-alam), alokasi BTT (dana kedaruratan/kebencanaan) tiap tahun sangat kecil.

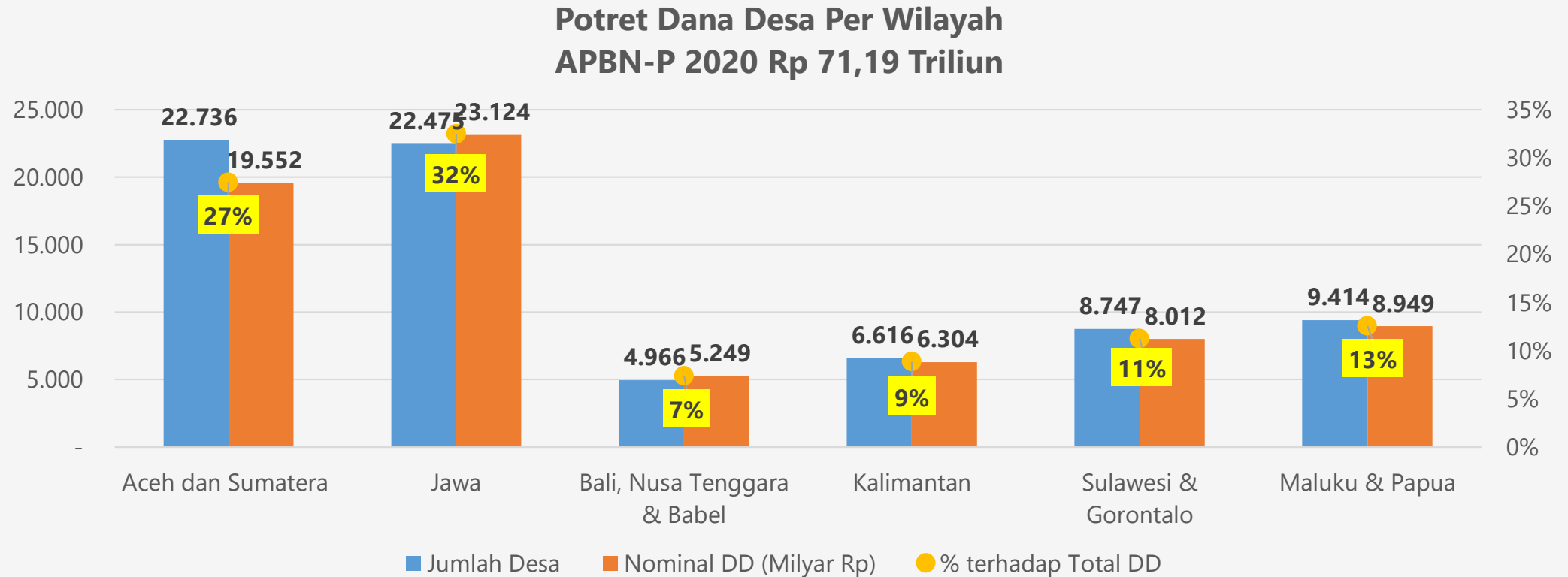
# Perhitungan Realokasi Anggaran berdasarkan Keputusan Bersama Mendagri No. 119/2813/SJ/2020 dan Menkeu No. 177/KMK.07/2020 ...

## Asumsi Realokasi APBD Skema 50% dari Belanja Barang&Jasa Dan Belanja Modal Seluruh Pemda di Indonesia



- Potensi realokasi APBD dengan skema 50% Belanja Barang/Jasa Rp160,61 Triliun dan 50% Belanja Modal Rp118,33 Triliun, atau total Rp278,94 Triliun;
- Hingga saat ini baru terkumpul Rp 85 Triliun dari Realokasi APBD seluruh Indonesia (94% daerah)

# Potret Dana Desa 2020

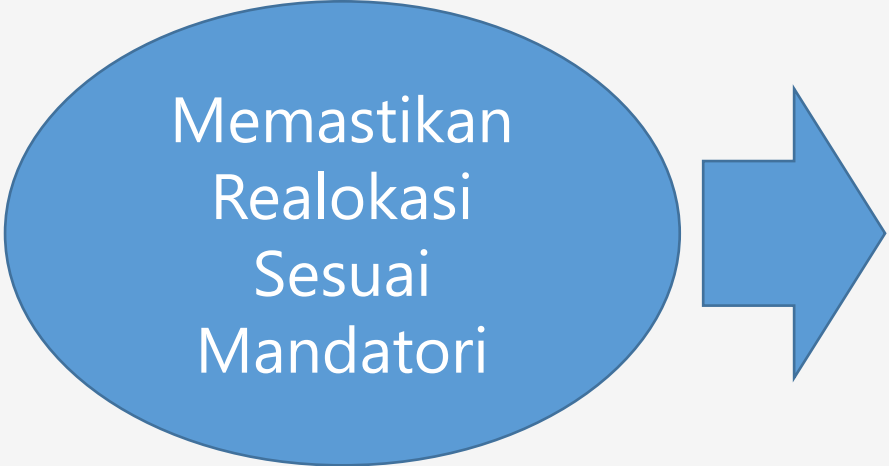


- Total Dana Desa dalam APBN-P 2020 sebesar Rp 71,19 Triliun untuk 74.954 Desa;
- Rata-rata DD Per Desa di Wilayah: Aceh & Sumatera Rp859.957.776,-; Jawa Rp1.032.880.979,-; Bali-Nusa Tenggara-Babel Rp1.093.233.991,-; Kalimantan Rp952.841.596,-; Sulawesi & Gorontalo Rp915.971.190,-; dan Maluku-Papua Rp950.605.481.

## Pengawasan Skema Realokasi Dana Desa untuk BLT

---

Memastikan  
Realokasi  
Sesuai  
Mandatori



1. Desa penerima DD kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DD
2. Desa penerima DD antara Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah DD.
3. Desa penerima DD lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah DD.

# Tantangannya, dana transfer ke daerah & DD belum optimal ...

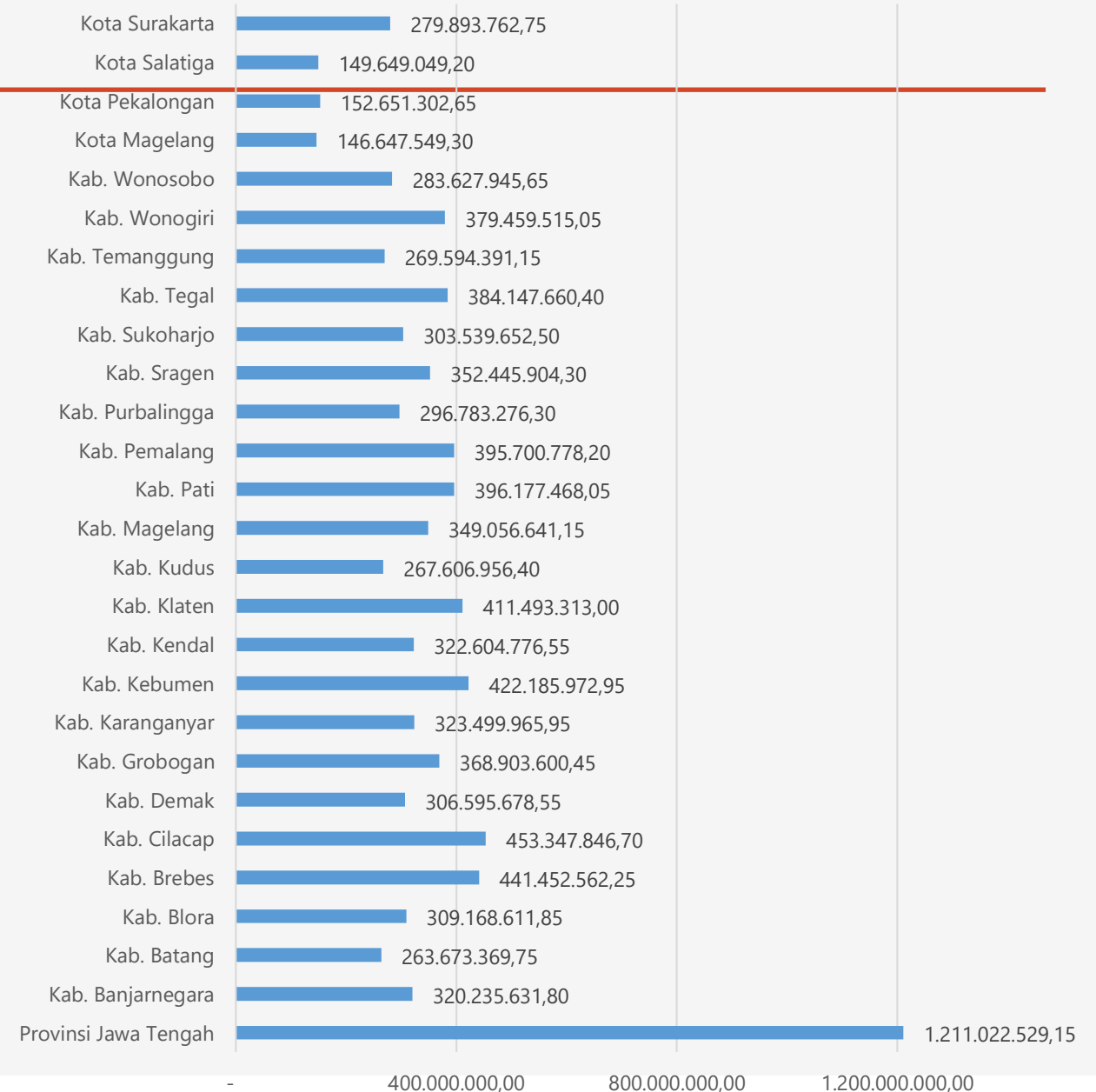
- **Pendapatan Negara : Rp216,61 triliun**
  - Penerimaan Perpajakan mencapai Rp177,96 triliun atau 9,54 persen dari target APBN tahun 2020, terdiri dari:
    - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp152,92 triliun atau 9,31 persen serta Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp25,04 triliun atau 11,22 persen
  - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp38,62 triliun atau 10,52 persen.
- **Belanja Negara : Rp279,41 triliun**
  - Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp161,73 triliun atau 9,61 persen
  - TKDD mencapai Rp117,68 triliun atau 13,73 persen.
- **Defisit Anggaran : Rp62,80 triliun**
- **Pembiayaan Anggaran : Rp112,93 triliun (Utang)**

APBN (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 28 Feb	%thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 29 Feb	%thd APBN	Growth (%)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>2.165,11</b>	<b>217,80</b>	<b>10,1</b>	<b>8,5</b>	<b>2.233,20</b>	<b>216,61</b>	<b>9,7</b>	<b>(0,5)</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>2.164,68</b>	<b>217,69</b>	<b>10,1</b>	<b>8,5</b>	<b>2.232,70</b>	<b>216,58</b>	<b>9,7</b>	<b>(0,5)</b>
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,38	177,44	9,9	10,1	1.865,70	177,96	9,5	0,3
2. PNBP	378,30	40,25	10,6	2,1	367,00	38,62	10,5	(4,0)
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>0,44</b>	<b>0,11</b>	<b>25,5</b>	<b>(24,7)</b>	<b>0,50</b>	<b>0,03</b>	<b>5,7</b>	<b>(74,3)</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>2.461,11</b>	<b>271,83</b>	<b>11,0</b>	<b>9,2</b>	<b>2.540,42</b>	<b>279,41</b>	<b>11,0</b>	<b>2,8</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.634,34</b>	<b>145,69</b>	<b>8,9</b>	<b>14,2</b>	<b>1.683,48</b>	<b>161,73</b>	<b>9,6</b>	<b>11,0</b>
1. Belanja K/L	855,45	71,23	8,3	29,1	909,62	83,88	9,2	17,8
2. Belanja Non K/L	778,89	74,46	9,6	2,9	773,86	77,85	10,1	4,6
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>826,77</b>	<b>126,14</b>	<b>15,3</b>	<b>3,9</b>	<b>856,95</b>	<b>117,68</b>	<b>13,7</b>	<b>(6,7)</b>
1. Transfer Ke Daerah	756,77	121,15	16,0	4,2	784,95	116,02	14,8	(4,2)
2. Dana Desa	70,00	5,00	7,1	(4,4)	72,00	1,66	2,3	(66,8)
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(20,11)</b>	<b>(19,98)</b>	<b>99,3</b>	<b>43,9</b>	<b>(12,01)</b>	<b>(28,51)</b>	<b>237,4</b>	<b>42,7</b>
<b>D. Defisit</b>	<b>(296,00)</b>	<b>(54,03)</b>	<b>18,3</b>	<b>11,8</b>	<b>(307,23)</b>	<b>(62,80)</b>	<b>20,4</b>	<b>16,2</b>
% Defisit thd PDB	<b>(1,84)</b>	<b>(0,34)</b>			<b>(1,76)</b>	<b>(0,37)</b>		
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>296,00</b>	<b>198,34</b>	<b>67,0</b>	<b>233,0</b>	<b>307,23</b>	<b>112,93</b>	<b>36,8</b>	<b>(43,1)</b>
a.l. I. Pembiayaan Utang	359,25	199,47	55,5	240,9	351,85	115,58	32,8	(42,1)
II. Pembiayaan Investasi	(75,90)	(2,00)	2,6	-	(74,23)	(3,00)	4,0	50,0
<b>Si LPA/Si KPA</b>	<b>-</b>	<b>144,31</b>			<b>-</b>	<b>50,13</b>		

## Tantangan berikutnya, Penundaan DAU

- Penundaan DAU yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan karena Daerah terlambat dalam melakukan penyesuaian APBD untuk Penanganan Covid-19 atau penyesuaian APBD tidak sesuai ketentuan regulasi;
- Di Jawa Tengah misalnya, selain Provinsi Jateng, ada 26 Kab/Kota yang terkena penundaan DAU;
- Efek penundaan DAU di tengah melambatkan pendapatan daerah dari PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dikhawatirkan akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan publik daerah.

### Penundaan DAU Provinsi/Kab/Kota Di Jawa Tengah



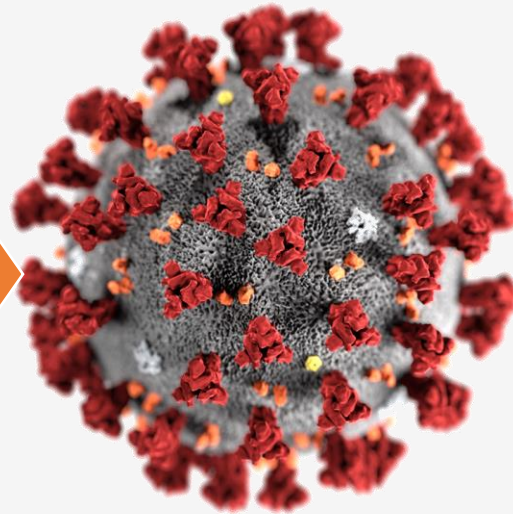
# Rekomendasi

## Revitalisasi Tata Kelola Anggaran Anggaran Covid-19

Dashboard  
Data Anggaran COVID-19

Transparansi

- Sumber anggaran
- Jumlah anggaran
- Jenis belanja
- Sasaran tiap belanja
- Friendly access



- Evaluasi Manajemen  
Penanganan Covid-19:
- Koordinasi antar Gugus Tugas
    - Penyempurnaan Sistem Informasi (Anggaran)
    - Pelibatan NGOs & Media

- Update realisasi realtime; harian, mingguan, bulanan
- Hasil dan keluaran

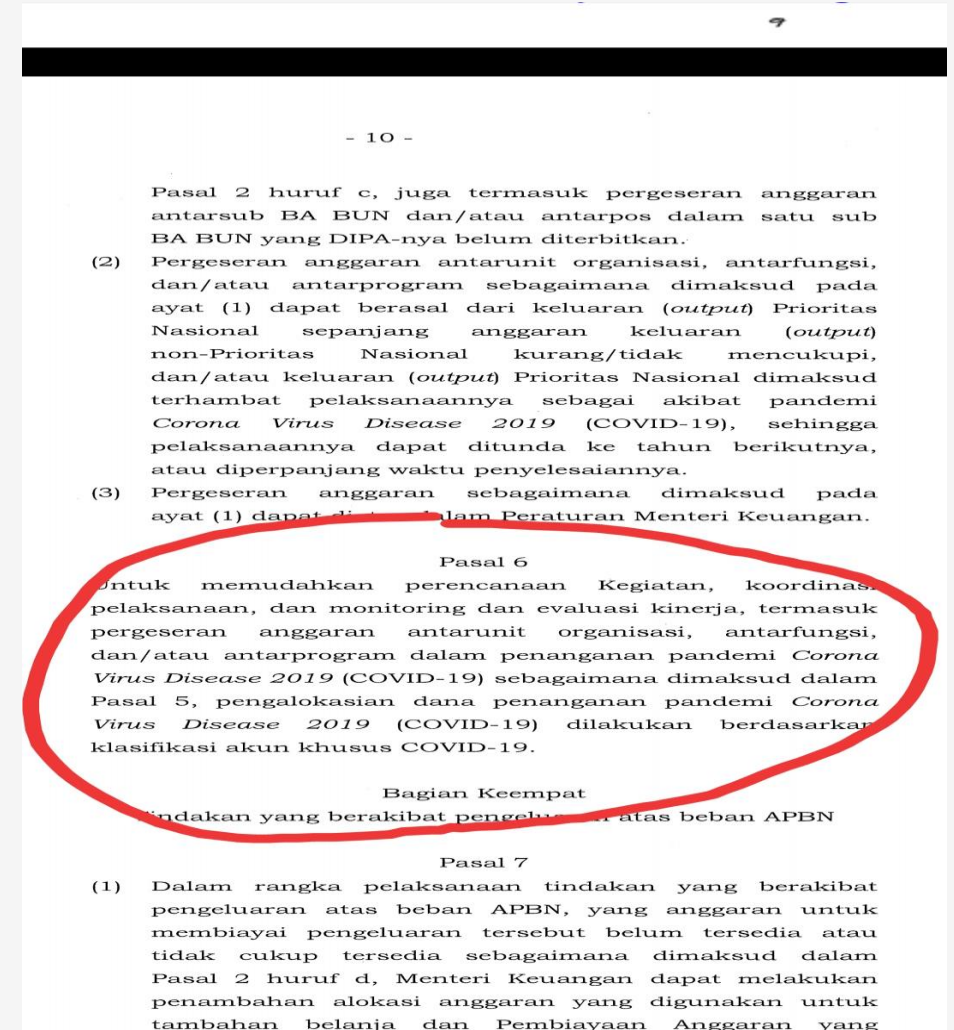
Akuntabilitas

- Laporan pada DPR/DPRD
- Pengawasan melekat (inspektorat, BPKP, BPK)
- Audit atau monitoring oleh masyarakat

# Terkait Transparansi

## Pentingnya Laman Transparansi Informasi Anggaran Covid-19 (Budget Line Item)

1. Menghindari tumpang tindih program antar K/L, Pemda, Desa;
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi program2 pengangan Covid-19;
3. Perlunya kode account klasifikasi program tersendiri untuk memudahkan konsolidasi anggaran dan yang dialokasikan dan dibelanjakan;
4. Memuat informasi anggaran penanganan Covid/19 di berbagai instansi dan level pemerintahan, serta realisasinya secara periodik.





## 5 Alasan Pentingnya Akuntabilitas Anggaran Covid-19

---

1. Penting disaat krisis untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap Langkah-Langkah yang diambil pemerintah;
2. Menelusuri rencana dan pelaksanaan untuk mengetahui kemajuan Langkah-Langkah yang ditempuh;
3. Mengidentifikasi keberlanjutan dan penanda potensi resiko fiscal;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang telah dialokasikan;
5. Mencegah atau mendekteksi potensi korupsi dan *mismanagement*.